

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI  
DESA TUA NANGA KECAMATAN POTO TANO KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (SI) pada program studi ilmu pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram**



**OLEH:**

**BURHANUDDIN  
NIM. 217130006**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI  
DESA TUA NANGA KECAMATAN POTO TANO KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

Telah memenuhi syarat dan disetujui

Tanggal 10 Februari 2021

Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Drs. H. Darmansyah, M.Si.  
NIDN. 0008075914

Mengetahui

Dosen Pembimbing II



Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.  
NIDN. 0822048901

Mengetahui

Ketua Program Studi  
Ilmu pemerintahan



Ayatullah Hadi, S.Ip., M.Ip.  
NIDN. 081605790

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI**  
**DESA TUA NANGA KECAMATAN POTO TANO KABUPATEN**  
**SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

Disusun dan Diajukan oleh:

**BURHANUDDIN**  
NIM. 217130006

**PROGRAM STUDI**  
**ILMU PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan di depan penguji dalam ujian Skripsi pada tanggal 11 februari 2021  
Dan Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

**Tim Penguji**

1. **Drs. H. Darmansyah, M. Si.**  
NIDN. 0008075914

Ketua

2. **Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP**  
NIDN. 0822048901

Anggota I

3. **Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si**  
NIDN. 0815118302

Anggota II

Mengetahui  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,

**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 0806066801

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : BURHANUDDIN

Nim : 217130006

### Dengan ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di tingkat Universitas Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan tim pembimbing
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.



Mataram 10 Februari 2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Burhanuddin  
NIM : 217130006  
Tempat/Tgl Lahir : Tua Nanga, 06 November 1996  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
No. Hp/Email : 085.337.395.482 / burhanuddin217130006@gmail.com  
Judul Penelitian : -

Implementasi program Kampung Layang Tunas (KLT)  
Di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten  
Sumbawa Barat Tahun 2020

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. dg no 679049%*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 2 Maret 2021

Penulis

  
BURHANUDDIN  
NIM 217130006

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

  
Iskandar, S.Sos. M.A  
MDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BURHAMUDDIN.....  
NIM : 21713006.....  
Tempat/Tgl Lahir : Tua Marga, 06 November 1996.....  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.....  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.....  
No. Hp/Email : 085.537.395.482 / burhamuddin21713006@gmail.com.....  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Tua Marga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.....

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 2 Maret 2021

Penulis



BURHAMUDDIN  
NIM 21713006

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Skandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN 0802048904

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“NEVER GIVE UP”

“Jangan pernah menyerah”

(Burhanuddin/Penulis)

### Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Untuk yang selalu memberikan segala hal yang tak akan ada habisnya sebagai penguasa alam semesta, tanpanya semua harapan ini akan menjadi sirna, tak ada kata lain yang mampu terucap selain kata syukur atas segala nikmat yang telah engkau berikan, terimah kasih ya ALLAH dan terimah kasih ya Rasulullah MUHAMMAD SAW.
- ❖ Kedua unuk orang tuaku bapak Junaidi dan ibu Kinik yang telah membiayai kuliah ku dari awal sampai semester 8, yang selalu memenuhi kebutuhan ku dari kecil, semoga dirimu bahagia disurga dengan pencapaianku saat ini, walau dirimu tak dapat menyaksikan langsung tapi ini ku persembahkan untuk dirimu.
- ❖ Bapak ibu dosen yang telah mengajarkan ilmu kepada saya, teman-teman kelas Ilmu Pemerintahan angkatan 2017, yang selalu ada dalam tawa dan duka. Tak ada kata lain yang mampu terucap ialah “Terimah Kasih”

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun skripsi yang berjudul “Implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020” dapat di selesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani.,M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram dan Jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si Selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S. IP., M. IP Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
4. Bapak Dr. H. Darmansyah, M.Si Selaku Dosen Pembimbing I
5. Bapak Rahmat Hidayat, S. AP., M. AP. Selaku Dosen pembimbing II , terima kasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan pada khususnya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada umumnya yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan penulis skripsi ini.

7. Kedua Orang Tua saya yang sangat berjasa dan selalu mendoakan dan memberikan dukungan tanpa lelah sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dan semua pihak yang telah banyak memberikan masukan kepada peneliti baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam penyusunan Skripsi.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati yang sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat peneliti harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan secara penuh oleh khalayak umum yang berminat dengan karya ini.

Mataram, 10 Februari 2021

Penulis

BURHANUDDIN

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di desa Tua Nanga kecamatan Poto Tano Sumbawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Tua Nanga kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun aspek yang diteliti secara garis besar meliputi implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) dan faktor pendukung dan penghambat implementasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui cara observasi dan wawancara, di tunjang pula dengan studi dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan implementasi program bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Meliputi komunikasi yaitu sosialisasi program BLT dimana tingkat keberhasilan jika informasi sampai tingkat paling bawah dari sasaran tersebut. Kemudian dimana kelembagaan tim koordinasi program BLT pada tingkat kabupaten dapat dioptimalisasi fungsi dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) dan pemerintah desa. Namun yang jadi masalah satu kendala yang dihadapi adalah Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintah desa.

**Kata kunci :** Implementasi program Bantuan langsung Tunai (BLT).



## ABSTRACT

This study was located in Tua Nanga village, Poto Tano sub-district, West Sumbawa. The purpose of this study is to see how the direct cash assistance (BLT) program is implemented in Tua Nanga Village, Poto Tano Sub-District, West Sumbawa Regency. The implementation of the direct cash assistance (BLT) program, as well as the factors supporting and obstructing its implementation, are among the topics covered in broad strokes. The findings of this study show that in Tua Nanga Village, Poto Tano District, West Sumbawa Regency, the implementation of the cash transfer program for the poor is linked to communication, specifically the socialization of the BLT program, where the level of information success reaches the lowest level of the target. The functions and coordination of the regional poverty reduction team (TKPKD) and the village government could then be optimized by the institutional coordination team for the BLT program at the district level. However, an issue is that the village government's Human Resources are one of the biggest problems.

**Keywords:** *Implementation of the direct cash assistance (BLT) program.*



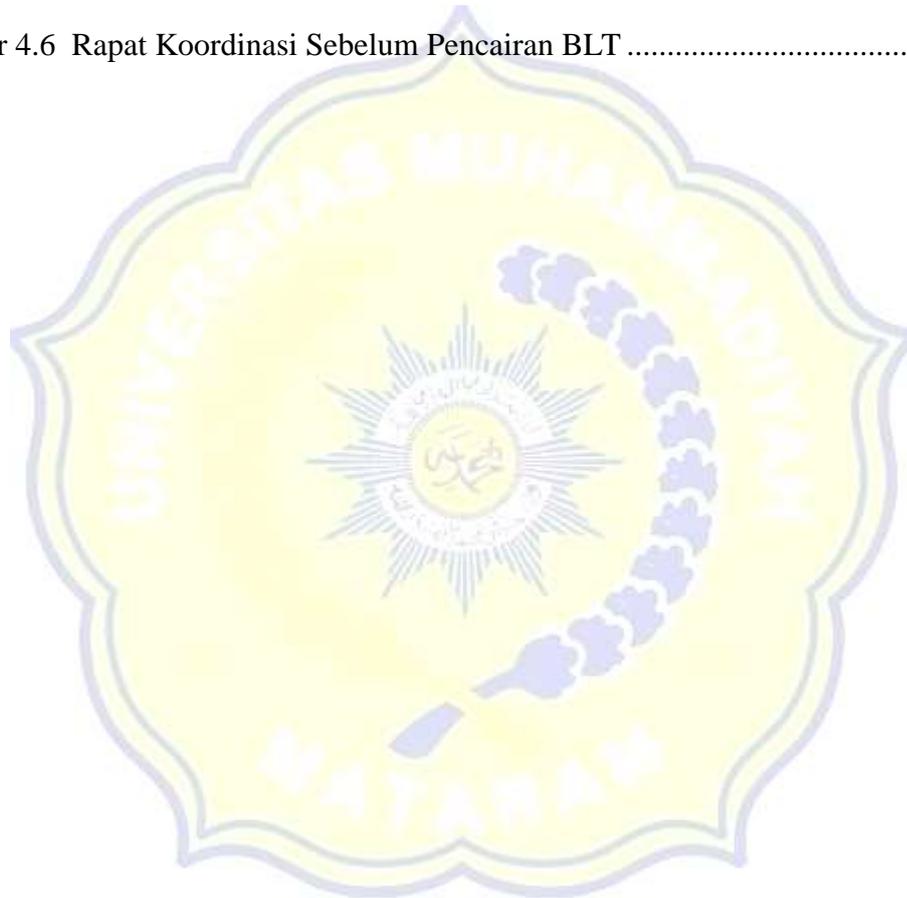
## DAFTAR ISI

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>         | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>    | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>    | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>    | <b>iv</b>   |
| <b>PLAGIARISME .....</b>           | <b>v</b>    |
| <b>PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b> | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>         | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>    | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>         | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>               | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>              | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>             | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>           | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>          | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>           |             |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....   | 1           |
| 1.2 Rumusan masalah.....           | 5           |
| 1.3 Tujuan penelitian.....         | 5           |
| 1.4 Manfaat penelitian.....        | 5           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>     |             |
| 2.1 Penelitian Relevan.....        | 7           |
| 2.2 Implementasi .....             | 11          |
| 2.3 Kebijakan Publik.....          | 13          |
| 2.4 Implementasi Kebijakan.....    | 22          |
| 2.5 Konsep Kemiskinan .....        | 32          |

|   |    |
|---|----|
| 2.6 Konsep Bantuan Langsung Tunai .....   | 36 |
| 2.7 Kerangka Berpikir .....   | 43 |
| <br><b>BAB III METODE PENELITIAN</b>  |    |
| 3.1 Jenis penelitian .....  | 45 |
| 3.2 Lokasi Penelitian dan waktu .....   | 45 |
| 3.3 Pemilihan Informan/Nara Sumber .....  | 46 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data .....   | 47 |
| 3.5 Jenis dan Sumber Data .....   | 49 |
| 3.6 Metode Analisis Data .....  | 51 |
| 3.7 Uji Validitas Data .....  | 52 |
| <br><b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>  |    |
| 4.1 Deskripsi Data .....  | 57 |
| 4.1.1 Gambaran umum Lokasi Penelitian .....   | 57 |
| 4.1.2 Jumlah Penduduk Desa Tua Nanga .....  | 58 |
| 4.1.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tua Nanga .....  | 59 |
| 4.1.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tua Nanga .....  | 60 |
| 4.1.5 Sarana dan Prasarana Desa Tua Nanga .....   | 60 |
| 4.2 Pembahasan .....  | 61 |
| 4.2.1 Implementasi Program Bantuan Lansung Tunai (BLT) Di Desa Tua<br>Nanga Kecamatan Poto Tano .....                       | 61 |
| 4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Bantuan Langsung<br>Tunai (BLT) Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano ..... | 79 |
| <br><b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>   |    |
| 5.1 Simpulan .....  | 86 |
| 5.2 Saran .....   | 87 |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |    |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  |    |

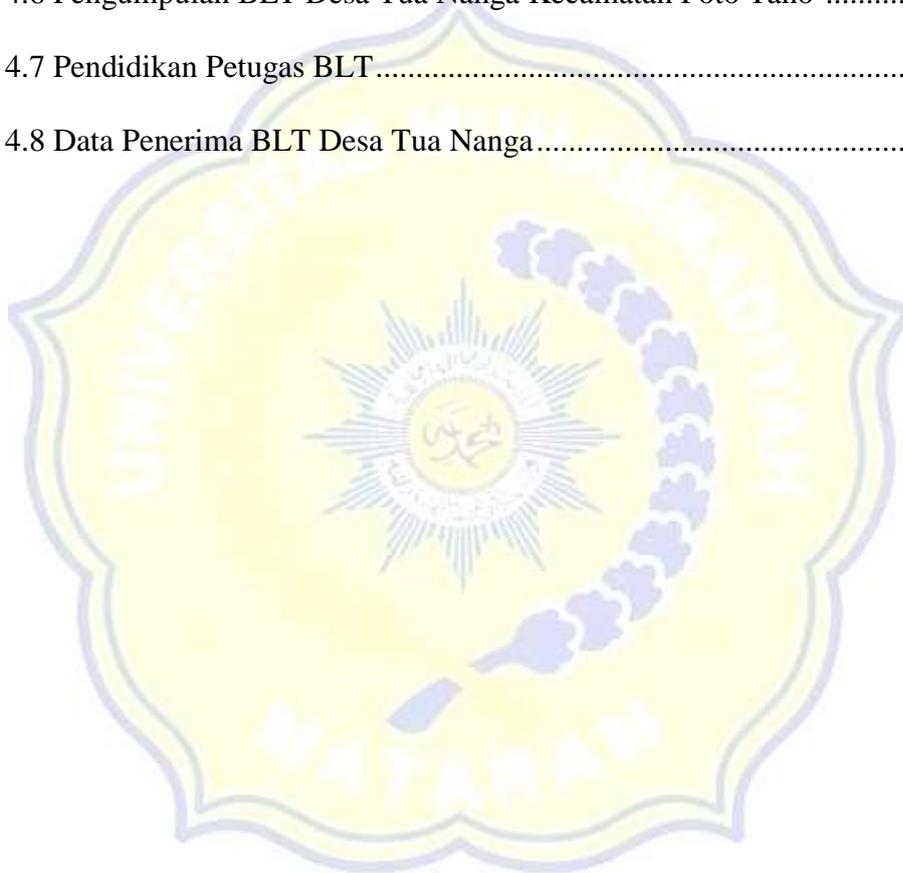
## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 2.1 Struktur Kerangka Berpikir Penyaluran BLT Desa Tua Nanga . | 44 |
| Gambar 4.2 Sosialisasi Penyaluran BLT Di Desa Tua Nanga .....         | 62 |
| Gambar 4.3 Sosialisasi BLT Tingkat Kabupaten .....                    | 68 |
| Gambar 4.4 Struktur Petugas Pembagian BLT .....                       | 71 |
| Gambar 4.5 Pembagian BLT Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano .....     | 73 |
| Gambar 4.6 Rapat Koordinasi Sebelum Pencairan BLT .....               | 81 |



## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Tedahulu .....                                    | 7  |
| Tabel 4.2 Jumlah penduduk Desa Tua Nanga Berdasarkan Jenis Kelamin.... | 58 |
| Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....          | 59 |
| Tabel 4.4 Mata Pencaharian Berdasarkan Lapangan Pekerjaan .....        | 60 |
| Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Desa Tua Nanga.....                     | 61 |
| Tabel 4.6 Pengumpulan BLT Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano .....     | 63 |
| Tabel 4.7 Pendidikan Petugas BLT.....                                  | 73 |
| Tabel 4.8 Data Penerima BLT Desa Tua Nanga.....                        | 85 |



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tujuan Negara ini merupakan salah satu untuk mengatur kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Dan tujuan Negara ini petunjuk untuk mengatur dan mempertahankan alat perlengkapan Negara dalam mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari masing-masing Negara di pengaruhi dimana tempat, awal bentuknya, dan di pengaruhi dari yang berkuasa Negara yang bersangkutan (Suharto, 2008: 23). Selain itu, tujuan negara juga diungkapkan oleh Wicaksono (2006: 18), yaitu menciptakan keadaan agar masyarakat bisa mencapai keinginannya secara maksimal.

Indonesia adalah suatu negara yang berkembang di dunia, dalam hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor Indonesia juga masih kurang dalam sumber daya manusia, salah satunya masyarakat. Beberapa hal yang di hadapi oleh masyarakat Indonesia masih juga belum baik dalam segi sosial maupun politik, yaitu kemiskinan itu sendiri merupakan masalah yang sudah lama dihadapi oleh di Indonesia pertama pada tahun 2014-2015, terjadi kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tingkat pendidikan masih kurang, produktivitas lapangan kerja sedikit, tingkat upah sangat kurang, distribusi pendapatan yang timpang, kesempatan peluang kerja kurang, hingga politik yang belum stabil. Menurut data kemiskinan pada tahun 2017, beberapa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2016 hampir mencapai 28,51 juta orang di sekitar 11,13% (BPS, 2016: 5).

Menurut data kemiskinan Provinsi NTB pada tahun 2019, menunjukkan jumlah penduduk yaitu 5.070.385 jiwa, dengan jumlah penduduk miskin yaitu 735.96 ribu jiwa (14,56%). Data jumlah penduduk kabupaten Sumbawa barat yaitu 148.606 sedangkan data jumlah penduduk kecamatan Poto Tano yaitu 11.129 dengan jumlah penduduk miskin yaitu. Khususnya di desa Tua Nanga jumlah penduduk miskin mencapai 300 dari jumlah penduduk.

Pada tahun 2020 negara Indonesia terkena musibah yang sangat berbahaya yaitu Covid-19 menyebabkan bertambahnya penduduk miskin. Kenaikan harga barang masyarakat akan berdampak secara berantai pada kehidupan sehari-hari sehingga dapat berpengaruh pada penurunan daya beli sebagian banyak masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin.

Sejarah awal lahirnya BLT pada tahun 2004 pemerintah Indonesia memastikan Covid-19 ini sangat berbahaya bagi Indonesia dan seluruh dunia yang semakin tajam pada tahun 2020. Dan sekarang pemerintah kembali melaksanakan program BLT melalui Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2020 (Inpres 3/2020) tanggal 29 Agustus 2020 dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran (RTS) Program BLT Bantuan langsung tunai tak bersyarat yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2020 yang ditunjukkan kepada masyarakat bagi yang terkena *COVID-19*. Lalu pemerintah membuat suatu kebijakan program BLT ini dalam upaya membantu masyarakat miskin yang terdampak dari *COVID-19* dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama pandemi besaran yang yang

diterima oleh masyarakat sebesar Rp 600.000-, selama 3 bulan pertama dan bulan selanjutnya sebesar Rp 300.000-selama lima bulan.

Dalam program BLT ini adalah ide yang lahir dari Wakil Presiden saat itu Jusuf Kalla usai memenangkan pemilu 2004 bersama Presiden SBY, Eksekutif, mengacu pada perintah Presiden nomor 12 tahun 2005 menggerakkan Program BLT tanpa syarat pada Oktober 2005 sampai Desember 2006. BLT adalah penjangkaran pengamanan sosial (JPS) dalam rangka meminimalisir dampak *COVID-19* bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ini juga, pemerintah memberi bantuan beras bagi masyarakat miskin sebagaimana tertuang dalam kebijakan stabilitas pangan yang di keluarkan pemerintah.

Program BLT merupakan bentuk program BLT yang akan dilakukan oleh pemerintah sebagai dampak *COVID-19*. Selain itu juga mendapatkan bantuan komoditas pangan berupa beras dan telur, BLT ini tetap di dampingi oleh program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan, yakni beras untuk rakyat miskin (raskin).

Di NTB penerima BLT sebanyak 1.171.200, terdiri 348.892 rumah tangga miskin, 1.644.523 rumah tangga miskin dan 1.227.793 rumah tangga hampir miskin. Kemudian kabupaten Sumbawa Barat 13,85% kecamatan Poto Tano tano terdapat 11.129 sedangkan khususnya Desa Tano terdapat 286 KK penerima BLT.

Adapun BLT selama *covi-19* adalah bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, Listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan dan BLT usaha mikro kecil.

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa program BLT di Desa Tua Nanga kecamatan Poto Tano tidak tepat sasaran, karena saya berpikir dalam diadakan BLT ini tidak efisien karena untuk mendorong pola hidup masyarakat yang malas, BLT ini juga dapat menciptakan masyarakat lebih tidak ingin kerja karena pemerintah hanya memberikan uang hingga masyarakat yang kurang untuk merealisasikan program BLT. Dan pemerintah juga pengurus setempat yang banyak tahu kondisi daerah masing-masing, BLT ini juga bisa akan menimbulkan terjadinya konflik antar kelompok. Angka kemiskinan, kriminal, pembunuhan di berbagai masyarakat juga akan meningkat.

Selain itu Implementasi Program BLT di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano tidak optimal, karena data yang di pakai tidak di lakukan revisi atau di verifikasi terlebih dahulu. Penyampaian BLT ini dibutuhkan data yang valid siapa dan di mana RTS yang pantas menerima BLT tersebut bertempat tinggal.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano?
2. Apa sajakah Pendukung dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano?
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam penghambat Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harap memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Peneliti ini di harapkan akan memberi pemahaman, pengetahuan, dan gambaran utuh tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi pemerintah, sebagai masukan untuk merumuskan Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
2. Bagi masyarakat, sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengenal Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

## 2.1 Penelitian Relevan

Tabel 2.1. Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan tahun | Judul  | Hasil   |
|----|----------------|--|---|
| 1  | Arifin, 2014   | Pembangunan dan problem sosial di perkotaan Analisis problem kemiskinan masyarakat Wonokromo sebagai Dampak Pembnagunan Kota Surabaya) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Adanya kepentingan ekonomi dalam setiap pembnagunan di wilayah Wonokromo. Hal ini di sebabkan antara lain : a) Upaya pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, b) Lokasi atau lahan sangat strategis untuk kepentingan ekonomi investor, c) Kebijakan pembangunan yang di terapkan tidak disertai partisipasi warga dalam perumusan kebutuhan, (2)Problem kemiskinan yang timbul adalah akibat dari ketidaksamaan dalam penguasaan asset produksi, akses dan informasi kerja, minimnya fasilitas kesehatan, dan keharmonisan. |
| 2  | Iqbal, 2013    | Implementasi program Bantuan Langsung Tunai tahun 2008 di Kabupaten kebijakan Kudus  | Hasil pengamatan di lapangan merupakan : (1) sosialisasi ini sudah melaksanakan dengan tepat hingga sampai Kecamatan, namun ini kurang yang menindaklanjuti dengan diadakan sosialisasi sampai desa/kelurahan, (2) Verifikasi data nominasi RTS kurang sejalan dengan mestinya, beberapa 52 desa akan melaksanakan aturan ini.  |
| 3  | Zakiyah, 2013  | Perempuan dan kemiskinan (studi kasus kehidupan perempuan sebagai Buruh Bangunan di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)    | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan perempuan sebagai buruh bangunan di Desa Tropodo sangat melekat dengan kemiskinan struktural, mereka menjadi buruh bangunan karena himpitan ekonomi keluarga dan tradisi atau kebiasaan dalam menjalanipekerjaan sebagai buruh bangunan akibat rendahnya tingkat pendidikan yang hanya mampu tingkat SD  |
| 4  | Salam 2012     | Fenomena kemiskinan (studi kritis Atas Falsafah Hidup Orang Jawa)  | Hasil penelitiannya tersebut di simpulkan bahwa pandangan hidup Orang Jawa merpahkan pandangan yang di dasari pada mitos dan cerita-cerita mistik yang mengedepankan nilai-nilai keseimbangan, keserasian dan keharmonisan.   |

|   |                |  |   |
|---|----------------|--|---|
| 5 | Marini<br>2012 | Dampak penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tulang Kabupaten Siak | Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya 75 responden akan didapatkan BLT ini nyatanya hanya 21 responden benar-benar pantas untuk mendapatkan BLT dan 54 responden yang lain adalah responden yang tidak layak akan mendapatkan BLT tersebut. Ini menyebabkan karena 54 responden ini memiliki beberapa hasil yang sudah banyak 21 responden. Manfaat BLT untuk masyarakat miskin yaitu masyarakat miskin merasa disanjung para Pemerintah dan masyarakat miskin merasa bahwasannya Pemerintah menghargai bagi mereka, dan mudaratnya BLT terhadap masyarakat miskin yaitu dibuat masyarakat miskin jadi malas, bisa disebabkan masalah yang terjadi bagi sesama masyarakat |
|---|----------------|--|---|

Sumber: Jurnal Internasional dan Jurnal Nasional (2014, 2013, 2012)

Penelitian tentang kemampuan mengidentifikasi informasi tentang Implementasi program Bantuan Lansung Tunai (BLT) ) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano yang sudah dibaca pada siswa sudah pernah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2013) dengan judul Implementasi kebijakan Program Bantuan Langsung Tahun 2008 di Kabupaten Kudus. Pelaksanaan program BLT di Kabupaten Kudus berjalan dengan baik, lancar dan tertib. Hasil pengamatan di lapangan merupakan :

(1) Sosialisasi ini sudah melaksanakan dengan tepat hingga sampai kecamatan, namun ini kurang yang menindaklanjuti dengan diadakan sosialisasi sampai desa/kelurahan, (2) Verifikasi dan nominasi RTS kurang sejalan dengan mestinya, beberapa 52 desa yang akan melaksanakan aturan imi. Masalah yang menjadi yaitu Kartu BLT sudah di terimah Kepala desa sebelum verifikasi data, ada bimbingan dari kantor pos akan tidak dilaksanakan aturan verifikasi, bisa dialikan Kartu BLT pada orang lain bisa dibawa surat keterangan dari desa, dan terjadinya masalah di masyarakat, kemudian ada pencabutan nama RTS yang di anggap tidak miskin.

Penelitian yang dilakukan oleh Zainul Arifin (2014) dengan judul pembangunan dan Problem sosial di perkotaan (Analisis Problem Kemiskinan Masyarakat Wonokromo sebagai Dampak Pembangunan Kota Surabaya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Adanya kepentingan ekonomi dalam setiap pembangunan di wilayah Wonokromo. Hal ini sebabkan antara lainnya) Upaya pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, b) Lokasi atau lahan sangat strategis untuk kepentingan ekonomi investor, c) kebijakan pembangunan yang di terapkan tidak disertai partisipasi warga dalam perumusan kebutuhan. (2) Problem kemiskinan yang timbul adalah akibat dari ketidaksaman dalam penguasaan asset produksi, akses dan informasi kerja, minimnya fasilitas kesehatan, dan pendidikan.

Penelitian selanjutnya adalah sebuah skripsi oleh Salam (2012), berjudul: Fenomena kemiskinan (Study Kritis Atas Falsafah Hidup Orang Jawa). Dalam penelitian skripsinya ini, Nur Salam mengangkat pertanyaan tentang bagaimana fenomena kemiskinan terutama keterkaitannya dengan falsafah hidup orang Jawa Dan dari hasil penelitiannya tersebut disimpulkan bahwa pandangan hidup orang Jawa merupakan pandangan yang didasari pada mitos dan cerita-cerita mistik yang mengedepankan nilai-nilai keseimbangan, keserasian dan keharmonisan. Pandangan tersebut secara historis diciptakan oleh penguasa (raja) yang mengkultuskan dirinya sebagai Tuhan (dewa) sehingga memonopoli tanah dan menjadikan petani (*wong cilik*) sebagai obyek pengambilan *upeti* (pajak). Akibatnya *wong cilik* tidak bisa mencukupi kebutuhannya dan termiskinkan. Kemiskinan yang dialami oleh petani (*wong cilik*) terjadi karena akibat kurangnya atau minimnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah (2013), dengan judul: perempuan dan kemiskinan (Studi Kasus Kehidupan perempuan sebagai Buruh Bangunan di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo) Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kehidupan perempuan sebagai buruh bangunan di Desa Tropodo sangat melekat dengan kemiskinan struktural, mereka menjadi buruh bangunan karena himpitan ekonomi keluarga dan tradisi atau kebiasaan dalam menjalani pekerjaan sebagai buruh bangunan akibat rendahnya tingkat pendidikan yang hanya mampu sampai tingkat SD Selama bekerja, buruh bangunan hanya di fasilitasi tempat tinggal yang tidak layak huni, dan diberi upah yang lebih sedikit dari laki-laki.

Penelitian selanjutnya oleh Marini (2012), berjudul: Dampak penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tulang Kabupaten Siak. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya 75 responden akan didapatkan BLT ini nyatanya hanya 21 responden yang benar-benar pantas untuk mendapatkan BLT dan 54 responden yang lain merupakan responden yang tidak layak akan mendapatkan BLT tersebut. Ini menyebabkan karena 54 responden memiliki beberapa jumlah hasil yang sudah banyak 21 responden. Manfaat BLT untuk masyarakat miskin yaitu masyarakat miskin merasa di sanjung parah Pemerintah dan masyarakat miskin merasa bahwasannya Pemerintah menghargai bagi mereka, dan mudaratnya BLT terhadap masyarakat miskin adalah dibuat masyarakat miskin menjadi malas, bisa disebabkan masalah yang terjadi bagi sesama masyarakat, dan masyarakat merasa tidak puas dalam proses BLT, selanjutnya beberapa mudaratnya dari pada manfaatnya dan ini yang menyebabkan BLT sudah di hapuskan dan diganti

dengan kebijakan yang lebih baik dan lebih dipentingkan masyarakat miskin tidak hanya dalam menjaga image pemerintah saja.

## **2.2. Implementasi**

### **1. Pengertian Implementasi**

Secara etimologis implementasi adalah menurut kamus Webster yang di kutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004) Webster dalam Wahab (2004:64) adalah:

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implantation, dalam kamus besar Webster, to implement (mengimplementasikan) juga to provide the means for cerrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to go give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (2001) dalam (Wahab (2001: 65) mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut.

Implementasi yaitu hal-hal yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, pemerintah atau swasta yang ditunjuk pada terciptanya tujuan-tujuan yang sudah diatur dalam keputusan kebijakan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah

maupun swasta yang bertujuan sebagai wujud keinginan serta tujuan yang sudah ditentukan. Implementasi juga ada kaitan dengan tindakan yang dilakukan dalam pelaksana dan merealisasikan program yang sudah di atur demi tercapainya tujuan untuk program yang sudah direncanakan, karena pada hakikatnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Badan-badan ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pemerintah untuk membawa dampak pada warga negaranya. Untuk itu pada prakteknya badan-badan pemerintah sudah menghadap pekerjaan-pekerjaan dibawah mandat dan undang-undang, sehingga bisa membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Maka Mazmainan dan Sebastiar (2001) dalam Wahab (2001:68) juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

Implementasi yaitu sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasa juga dalam bentuk undang-undang, dan dapat pula bentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Berkaitan dalam hal tersebut menurut Mazmainan dan Sebastier, implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, yang berbentuk undang-undang dan juga bisa berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan.

Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian

outputnya adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi bisa juga dianggap suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix.

## 2.3 Kebijakan Publik

### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Makna dalam bahasa Inggris modern adalah “*A course of action or plan, a set of political purpose as opposed to administration* (seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik yang berbeda dengan makna administrasi) Wicaksono, 2006: 53). Berbeda dengan pandangan Dunn (2000: 32), bahwa mendefinisikan kata kebijakan dari bahasa. Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa, Sanskerta dan Latin, akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta yaitu polis (Negara-kota) dan dapur (kota).

Dalam bahasa Yunani, istilah *public* bisa disebut juga dengan istilah koinon atau dalam bahasa Inggris dikenal kata common yang bertujuan hubungan antara individu. Dan karenanya *public* juga sering di konsepsikan sebagai suatu ruang berisi aktivitas manusia yang di lihat juga untuk mengatur di intervensi oleh pemerintah atau legitimasi sosial atau tidaknya oleh tindakan bersama (Dwijowijoto, 2003: 32).

Dan halnya definisi yang di berikan oleh Hogwood dan Gun yang menyatakan bahwa kebijakan publik yaitu suatu tindakan pemerintah yang sudah

di desain dalam tercapai hasil-hasil tertentu (Suharto,2008: 43). Disamping ini juga hogwood dan Gun menyebutkan sepuluh penggunaan istilah “kebijakan untuk pengertian modern juga berbagai label dalam sebuah bidang aktifitas, berbagai ekspresi tujuan luas dan aktifitas negara yang diharapkan, yaitu proposal spesifik, yaitu keputusan pemerintah, yaitu otoritas formal, yaitu sebuah program, yaitu output, yaitu hasil, yaitu teori atau model dan bisa sebagai proses (persons, 2008: 48). Kebijakan publik sebagai bentuk lain dari analisis politik (Elgar, 2005: 1-6).” *public policy,as forms of political analisis,uses metaphors or models asadevices to explore the unknown and possibly unknowable world of potitcs.*

## **2.Ciri-ciri kebijakan publik**

Menurut Massey (2003: 15) pendapat bahwa sektor publik memiliki 10 ciri yang berbeda dengan sektor swasta diantaranya adalah:

- a. Sektor publik lebih kompleks dan mengemban tugas-tugas yang lebih ambigu.
- b. Sektor publik lebih banyak menghadapi problem dalam mengimplementasikan keputusan-keputusanya.
- c. Sektor publik lebih memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam.
- d. Sektor publik lebih banyak memperhatikan usaha mempertahankan peluang dan kapasitas.

e. Sektor publik lebih banyak memperhatikan kompensasi atas kegagalan pasar.

f. Sektor publik lebih banyak melakukan aktivitas yang memiliki signifikansi simbolik.

g. Sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas.

h. Sektor publik mempunyai peluang yang lebih besar dalam merespon isu-isu keadilan dan kejujuran.

i. Sektor publik harus beroperasi demi kepentingan publik, dan

j. Sektor publik harus mempertahankan level dukungan publik minimal di atas level yang dibutuhkan dalam industri swasta.

Para ahli juga memberi pengertian kebijakan publik dengan kaitannya untuk keputusan atau ketetapan pemerintah dalam melakukan beberapa tindakan bisa mengganggu atau membawa gejala baik bagi kehidupan masyarakatnya. Definisi yang diberikan oleh Thomas R. Dye yang dikatakan dalam kebijakan publik pada luasnya mengandung pengertian mengenai *'whatever government choose to do or not to do'*. artinya, kebijakan publik yaitu apa yang diberi oleh pemerintah dalam melakukan atau tidak dilakukan (Winarmo, 2002: 54).

Dan selanjutnya analisis kebijakan, sangatlah berpengaruh penting untuk mengimplementasikan kebijakan atau pelaksanaannya, dan nanti bisa pada selanjutnya membuat suatu kesimpulan arti dari suatu kebijakan tersebut efektif

atau tidak dan apakah kebijakan itu sudah tepat dengan aturan kebijakan tersebut atau tidak. Dan juga merupakan elemen penting untuk analisis kebijakan.

### 3. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Dalam proses ini perlu bertahap-tahap menentukan kebijakan publik bisa disebut bahwa pemerintah sudah terpenuhi syarat-syarat dari ciri-ciri sistem politik demokrasi di Indonesia dan juga pemerintah mengkaitkan elemen masyarakat untuk menetapkan kebijakan publik tersebut.

Menurut Winarmo (2002: 28), tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

#### a. Tahap Fomulasi

Kebijakan ini juga di gunakan metode investigasi dan analisis dari aktivitas program. Tujuan kebijakan pada prinsipnya yaitu dilakukan intervensi, dan karena itu implementasi kebijakan seharusnya itu tindakan (*action*) intervensi ini sendiri. dan formulasi merupakan bentuk unit organisasi baru dan staf pelaksana, dijabarkan dalam aturan pelaksanaan (*standard operating procedures*), koordinasi; dibagi tugas-tugas ke dalam dan diantara instansi-instansi/badan pelaksana, dan pengalokasian sumber-sumber daya sampai tepat tujuan.

#### b. Tahap Implementasi

Tahap implementasi kebijakan ini ditempatkan kebijakan untuk berpengaruh beberapa faktor untuk rangka pelaksanaan kebijaksanaan itu sendiri yang dimaksud dengan faktor-faktor disini merupakan bentuk aspek yang sangat

penting, dan itu yang ditentukan, kinerja implementasi. Aspek-aspek ini perlu diidentifikasi secara teoritis sehingga dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas serta penyebab tinggi atau rendahnya kinerja implementasi suatu kebijakan.

Sekian lama memang sudah terdapat berapa tulisan yang sudah ingin mengidentifikasi faktor-faktor ini. Tulisan-tulisan ini cenderung berjalan sendiri-sendiri untuk menentukan variabel-variabel tertentu kinerja implementasi. Kendati demikian bisa ada kesadaran bersama untuk meluaskan defisit implementasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut.

#### c. Tahap Evaluasi

Dalam siklus kebijakan publik, tahap evaluasi yaitu tahapan yang sangat penting dari semua proses kebijakan publik. Tahap evaluasi adalah serangkaian kegiatan (tindakan) selesai suatu kebijakan dirumuskan, implementasi serta melakukan evaluasi dapat bertujuan dalam mengukur sejauhmana implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Wibawa (2009: 28), adapun tahapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan dan menetapkan suatu kebijakan publik adalah sebagai berikut.

##### a. *Agenda Setting*

*Agenda Setting* atau penyusunan agenda merupakan tahap-tahap kebijakan publik awal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan dan ditetapkan suatu kebijakan publik yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Susunan agenda adalah proses yang sangat baik dalam dimaknai arti sebetulnya yang terjadi kebutuhan prioritas masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang terpilih dan menentukan suatu

kebutuhan masyarakat yang sesuai dalam prioritas masyarakat secara luas, bukan prioritas masyarakat secara kelompok ataupun golongan tertentu.

Untuk menentukan prioritas kebijakan, pemerintah bisa mengukur dan memlihi aspirasi rakyat yang disalurkan melalui DPR maupun DPRD sesuai dengan tingkatan wilayah dapat kedua lembaga tersebut bisa dijalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dan juga kita ketahui, kemudian kebijakan publik merumuskan dan menetapkan berdasarkan prioritas, ketetapan kebijakan publik bisa didasarkan pada urgensi atau tingkat kepentingan kebijakan tersebut. Bisa juga jumlah kebijakan publik yang merumuskan masuk untuk prioritas juga tidak masuk ke dalam urgensi atau tingkat kepentingan yang mendesak.

b. *Policy formulating*

Tahap-tahapan ini dilakukan pemerintah untuk diumumkan kebijakan publik adalah *policy formulating* serta dilakukan formulasi kebijakan. Hal-hal permasalahan yang awal di tentukan dan diramu serupa mungkin oleh pemerintah selesai dibahas secara lebih lanjut ke dalam forum khusus dapat ditetapkan kebijakan yang akan berjalan di dalam negara atau daerah.

Dalam peramuan atau formulasi kebijakan publik, tentu akan terjadi dialog atau diskusi diantara pemangku kebijakan. Dan itu juga semua peserta dialog atau diskusi tentu perhatikan dengan cara mengeluarkan pendapat di depan umum agar proses peramuan yang dilakukan agar tidak terjadi masalah di dalam anggota forum.

c. *Policy adoption*

*Policy adoption* atau pengadopsian kebijakan yaitu tahapan ketiga yang dikerjakan pemerintah untuk menentukan kebijakan publik yang bisa dilakukan secara luas bagi masyarakat. Adopsi kebijakan ini beberapa tujuan secara aturan dalam memberikan otorisasi atau kehendak pada jalannya proses mendasar pemerintahan untuk ditetapkan kebijakan publik.

Otorisasi atau kehendak yang memberikan pada pemerintah yang dimaksudkan semua hanya pemerintahlah yang bisa dilakukan perubahan atau perbaikan ke dalam kebijakan publik. Selain juga, untuk tahapan ini, pemerintah bisa memungkinkan dalam melakukan adopsi kebijakan dari negara lain maupun daerah lain yang beres cocok dalam menerapkan di wilayah negaranya semata-mata hal salah satu tindakan dalam cara merawat kemajemukan bangsa Indonesia.

d. *Policy Implementation*

Tahapan keempat ini dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan atau ditetapkan kebijakan publik yaitu *Policy Implementation*. *Policy Implementation* atau implementasi kebijakan merupakan suatu langkah bisa disebut sebagai langkah penerapan serta langkah uji coba yang melakukan pemerintah untuk penerapan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat secara umum. Untuk tahapan ini, pemerintah sudah melakukan perannya salah satu pengawasan dalam mengawasi alurnya kebijakan publik yang berlaku di sekitar masyarakat.

Suatu negara yang memeluk teguh prinsi-prinsip demokrasi pancasila, pemerintah bisa dilibatkan peranan serta masyarakat dalam mengawasi penerapan kebijakan publik yang berlaku dikalangan masyarakat. Masyarakat di terutamakan dalam memberikan kritik dan saran sebagai kebijakan publik yang ditentukan. Kritik dan saran bisa di sampaikan kepada masyarakat untuk pemerintah secara dengan prosedur yang sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

e. *Policy Evaluation*

Sesudah keempat tahapan untuk menetapkan dan dilakukan kebijakan publik dilakukan, pemerintah bisa masih memiliki langkah terakhir yaitu *Policy Evaluation* atau evaluasi kebijakan yang awal di berlakukan untuk kurun waktu tertentu. Evaluasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah bisa juga disebut salah satu langkah yang dilakukan dalam menilai kebijakan publik yang sudah dilaksanakan dalam menyangkut pada subtansi, penerapan, dan dampak yang menimbulkan dari penerapan kebijakan publik itu sendiri. dengan tahapan evaluasi inilah pemerintah bisa dilakukan perbaikan kepada kebijakan publik yang sudah berdasarkan pengalaman yang sudah di lakukan selama kebijakan publik tersebut terlaksana.

Demikian penjelasan dan mengenai hal-hal kebijakan publik yang sudah melakukan oleh pemerintah serta rangka untuk menentukan dan penerapan kebijakan publik yang awal di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan melauai artikel ini, para pembaca terhadap tahapan-

tahapan kebijakan publik bisa bertambah wawasan. Semoga bisa bermanfaat untuk para pembaca sekalian.

## **2.4 Implementasi kebijakan**

### **1. Pengertian Implementasi kebijakan**

Menurut Edwards (2005: 54), Studi implementasi yaitu krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan serta masyarakat dalam di pengaruhinya. Dalam suatu kebijakan tidak pantas atau tidak dapat mengurangi masalah yaitu merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan tersebut akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan benar sementara juga, suatu kebijakan sudah cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut belum bisa di implementasikan dengan benar oleh para pelaksana kebijakan.

Implementasi kebijakan suatu langkah yang sangat bagus dalam proses kebijakan. Dalam pelaksanaan, yaitu kebijakan hanya sekedar sebuah dokumen yang tidak bermakna duntuk kehidupan masyarakat atau kebijakan-kebijakan itu berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsipkan kalau tidak diimplementasikan. Pada saat ini,

implementasi atau langkah pelaksanaan kebijakan menjadi sangat bagus tetap tidak berarti bahwa telah terlepas dari proses formulasi sebelumnya, artinya formulasi kebijakan makro yang ditetapkan terpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan mikro, yaitu para pelaksana kebijakan dan kebijakan operasional dalam kelompok sasaran dalam mengamati lingkungan, disamping itu ketidakjelasan kebijakan yaitu penyebab pertama gagal pelaksanaan (Wahab, 2001: 185).

Implementasi kebijakan adalah tahapan yang terhubung dalam rencana serta tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, implementasi adalah proses terjemahan pernyataan kebijakan (*policy statement*) ke dalam bentuk kebijakan (*policy action*) (Tangkilisan, 2010: 185). Pemahaman seperti ini juga berangkat dari pembagian proses kebijakan publik ke dalam jumlah tahap disitu implementasi berada di tengah-tengahnya.

Berdasarkan pendapat diatas, maka implementasi kebijakan adalah untuk menterjemahkan kebijakan publik yaitu pernyataan umum dalam maksud, tujuan dan serta mencapai tujuan dari berbagai fungsi dari implementasi program dan berpengaruh terhadap pencapaian.

## **2. Model-model Implementasi Kebijakan**

Kebijakan publik sedikit tidak memiliki tiga komponen yang mendasar, adalah (1) tujuan yang hendak dicapai, (2) sasaran yang spesifik, dan (3) cara mencapai sasaran tersebut. Cara memenuhi sasaran inilah yang biasa disebut dalam implementasi, yang sering diterjemahkan

ke sebuah program-program aksi dan proyek. Aktivitas implementasi ini sering mengandung di dalamnya: keberhasilan pelaksanaannya, besar dana dan sumbernya, siapa kelompok sasarannya, bagaimanapun manajemen program atau proyeknya, dan sebagai keberhasilan atau kerja program bisa diukur secara jelas implementasi kebijakan merupakan bagaimana sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak banyak dan tidak sedikit. Tujuan kebijakan pada dasarnya yaitu melakukan intervensi. Oleh karenanya implementasi kebijakan sebetulnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri (Wahab, 2001: 23).

Menurut Kismartini ddk (2005: 21-23), macam-macam implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

a. Model Merrilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merrilee S. Grindle dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) pada lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Ide yang mendasar yaitu bahwa sesudah kebijakan ditransformasikan, untuk melakukan implementasi kebijakan.

Isi kebijakan (*content of policy*) semua kepentingan akan dipenuhi oleh kebijakan, jenis manfaat akan menghasilkan, derajat perubahan yang diinginkan; sumber daya yang dikerahkan. Demikian lingkungan (*content of implementation*) menyerap kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; karakter lembaga dan penguasa dan patuh dan daya tanggap.

## b. Model George C. Edward III

Kemudian George C. Edward III dimukakan beberapa 4 (empat) variabel yang dipengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi keempat variabel ini saling terhubung satu sama lain. Variabel-variabel tersebut di jelaskan oleh Edwards (2005: 87), sebagai berikut:

### 1.) Komunikasi

Di dalam variabel komunikasi ini, secara luas Edwards membahas tiga pokok penting untuk proses komunikasi kebijakan, yaitu tranmisi, konsistensi, dan kejelasan. Menurut Edwards, syarat awal untuk implementasi kebijakan yang efektif merupakan bahwa orang melakukan keputusan bisa diketahui yang harus orang melakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah bisa dijalankan pada kelompok yang baik kemudian keputusan-keputusan dan perintah-perintah ini bisa diakui. Komunikasi bisa akurat, untuk proses transmisi lebih banyak hambatan-hambatan yang menghadang transmisi komunikasi pelaksanaan dan juga bisa menghalangi pelaksanaan kebijakan. Adapun yang bukan dari komunikasi menyangkut petunjuk-petunjuk pelaksanaan merupakan persoalan konsistensi keputusan-keputusan dalam bertentangan lebih dibingungkan dan dighalangi staf administrasi dan penghambat kemampuan dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan secara benar.

## 2. Sumber-sumber

Sumber-sumber sini merupakan salah satu sumber dalam melakukan kebijakan-kebijakan hingga implementasi kebijakan jalan secara benar. Sumber-sumber yang bagus meliputi staf yang memadai disertai untuk kemampuannya, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas untuk dibutuhkan dalam melakukan pelayanan public. Dan adanya sumber-sumber, kebijakan-kebijakan yang sudah di rumuskan di dalam kertas bisa akan jadi rencana saja tidak pernah ada realisasinya.

## 3. Disposisi

Dalam beberapa hal yang dipengaruhi efektifitas implementasi yaitu respon implementor. Kemudian implementor setuju untuk bagian-bagian isi dari kebijakan juga orang itu akan melakukan dengan baik hati tetapi jika pemikiran orang berbeda dengan pembuat kebijakan maka dari itu proses implementasi bisa mendapat banyak masalah.

Ada tiga hal sikap/respon implementor sehingga kebijakan; sadar pelaksana, petunjuk/arahan pelaksanaan bisa merespon program ke jalan penerimaan atau penolakan, intensitas dari respon tersebut. Kemudian pelaksanaan perlu memahami dari itu dan sasaran program secara benar karena orang menolak tujuan yang ada di dalamnya bisa secara sembunyi dialikan dan menghindari implementasi program.

Dibelakang ini dukungan para pejabat pelaksana sangat membutuhkan bisa dicapai sasaran program. Dukungan ini pimpinan sangat dipengaruhi pelaksana program bisa mencapai target secara efektif dan efisien.

#### 4. Sturuktur Birokrasi

Birokrasi yaitu salah satu badan yang menjadi pelaksana kebijakan. Pada kokonya, para pelaksana kebijakan diketahui saipa yang melakukan dan mempunyai skil keinginan serta sumber-sumber bisa melaksanakan, tetapi untuk melakukannya masih ada hambatan oleh struktur-struktur organisai untuk dijalankan kegiatan tersebut. Menurut Edwars, ada dua karateristik awal dari birokrasi, yaitu prosedur-prosedur kenerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut *standard operating system* (SOP) dan fragmentasi.

Sturuktur organisasi-organisasi dalam melakukan kebijakan sangat pengaruh penting pada implementasi. Yaitu dari aspek-aspek struktural yang mendasar dari suatu organisai merupakan aturan-aturan kerja ukuran dasarnya (SOP). Kemudian karakter kedua struktur organisasi yang dipengaruhi untuk pelaksanaan kebijakan yaitu fragmentasi diakibatkan pemikiran-pemikiran yang kecil dari semua dari banyak lembaga birokrasi.

#### c.Model Mazmanian dan Sabatier

Ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

- 1.) Karakter dari masalah (*tractability of problem*), indikatornya meliputi tingkat kesulitan aturan dari masalah yang bersangkutan; tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran terhadap total populasi; cakupan perubahan perilaku yang di harapkan.
- 2.) Karakter kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) indikator ini di liputi kejelasan isi kebijakan, beberapa mungkin kebijakan ini memiliki support teoritis; banyak alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut, beberapa besar adanya keterpautan dan support dengan berbagai institusi pelaksanaan kejelasan dan konsisten legitimasi ada pada badan pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap impian kebijakan beberapa besar akses kelompok-kelompok diluar dalam berpartisipasi untuk implementasi kebijakan.
- 3.) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikator ini meliputi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan SDM, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*), dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

d. Model Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- 1) Merupakan standar dan sasaran kebijakan bisa jelas dan terukur, hingga tidak menimbulkan interpretasi yang bisa terjadinya masalah/konflik di sekitar pada agen implementasi.
- 2) Sumber daya, kebijakan perlu di dukung dari sumber daya, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia.
- 3) Komunikasi dengan organisasi dan kekuatan aktivitas, untuk berbagai kasus, implementasi adalah program juga perlu di dukung dan dikoordinasikan untuk instansi lain agar bisa keberhasilan yang diinginkan.
- 4) Karakteristik pada pelaksana, beberapa jauh kelompok-kelompok kepentingan diberikan dukungan para implementasi kebijakan. Uda masuk di dalamnya karakteristik pada partisipasi yaitu di dukung atau menolak, kemudian biar bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apa bisa elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik, kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakupi sumber daya ekonomi lingkungan yang bisa didukung berhasil implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor, disposisi implementor mencakup beberapa hal penting, yaitu respon implementor terhadap

kebijakan, yang bisa dipengaruhi kemauannya dalam melakukan kebijakan, kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan, dan Intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

e. Model G Shabbir Cheema dan Denis A Rondinelli

Cheema dan Rondinelli digambarkan 4 kelompok variabel yang bisa dipengaruhi kerja dan dampak pada program antara lain (1). Kondisi lingkungan, (2). Hubungan antara organisasi, (3) sumberdaya organisasi dalam implementasi program,(4). Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

f. Model Soren Winter

Winter mengemukakan 3 (tiga) variabel yang dipengaruhi berhasilnya proses implementasi yaitu karakter hubungan antar organisasi. Dimensinya merupakan komitmen dan koordinasi antar organisasi, karakter implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya merupakan kontrol politik, kontrol organisasi dan etos kinerja dan norma-norma profesional, dan karakter sekelompok sasaran. Kelompok sasaran akan bisa diberi pengaruh pada dampak kebijakan dan juga dipengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, dan jika dampak akan timbul baik maka dari itu kerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya. Perilaku sekelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif masyarakat bisa mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang adanya

feed back sekian dari tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat.

Berdasarkan macam-macam implementasi kebijakan di atas, maka macam yang digunakan untuk penelitian ini Geoge C. Edwar III untuk dikaji.

Implementasi kebijakan, Edwards bisa digunakan dua buah pertanyaan untuk prakondisi–prakondisi apa yang dibutuhkan hingga bisa implementasi kebijakan berhasil dan hambatan apa yang mengakibatkan pada implementasi bermasalah. Untuk menjawab kedua pertanyaan itu, Edwards menggunakan empat pokok atau variabel krusial untuk implementasi kebijakan publik. Keempat faktor itu merupakan komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

Menurut Edwards, ada empat faktor ini berpengaruh pada implementasi kebijakan kerja secara simultan dan berinteraksi dengan yang satu dalam membantu dan penghambat implementasi kebijakan, dari pendekatan yang seimbang merupakan dengan cara mereflesikan kompleksitas ini dengan dibahas 4 faktor ini sekaligus. Dalam memahami suatu implementasi kebijakan butuh menyederhanakan dan bisa menyederhanakan bisa dirinci penjelasan-penjelasan dalam implementasi serta komponen-komponen pertama. Implementasi dari semua kebijakan adalah suatu proses yang dinamis yang mencakupi semua interaksi dari semua variabel. Dan karenanya, tidak ada variabel tunggal untuk proses

implementasi, sehingga dapat di jelaskan keterikatan antara satu variabel dengan variabel lainnya dan sebagaimana variabel-variabel itu dipengaruhi proses implementasi kebijakan.

## **2.5 Konsep kemiskinan**

Kemiskinan adalah sebuah konsep dan fenomena bermatra multidimensional. Kemiskinan pada luasnya didefinisikan berdasar dari segi ekonomi, khususnya pendapatan, berupa barang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-meterial yang diterima oleh orang. Kemiskinan yaitu suatu kondisi yang ada di bawah nilai rendah kebutuhan minimum, baik untuk kehidupan dan lainnya, bisa disebut dalam garis kemiskinan (*poverty Line*) atau batas kemiskinan (*Poverty Threshold*) (Suharto, 2008: 21).

Kemiskinan yaitu yang dimana terjadi kekurangan hal-hal yang tidak bisa dipunyai orang, seperti makanan, pakain, rumah ,air minum dan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan untuk hidup. Kemiskinan bisa berarti tidak akses pada pendidikan atau kerja yang bisa mengatasi masalah kemiskian dan kehormatan yang layak bagi masyarakat, sekaligus juga memutuskan akses terhadap terpenuh hak dasar atas pangan, kesehatan, pendidikan, peluang kerja, rumah, air bersih, manfaat sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya, perlindungan atas tanah, rasa nyaman, serta kesempatan masyarakat bisa berpartisipasi untuk program pembangunan. Demikian juga pemenuhan hak penduduk bermaksud erat kaitannya pada pengembangan suatu wilayah, dalam cepatnya pembangunan perdesaan,

revitalisasi pembangunan perkotaan, mengembangkan kawasan pesisir serta lajunya pembangunan daerah tertinggal (Parsons ,2005 :76).

Ada tiga tipe orang miskin pada pendapatan yang dibutuh setiap orang dalam setiap tahun,yaitu:

1. Miskin, orang miskin yang berpenghasilan kecil d dalam bentuk beras yaitu 315 kg/orang /tahun.
2. Sangat miskin, bisa dikatakan sangat miskin yaitu orang yang berpenghasilan jika diwujudkan bentuk beras adalah 250 kg/orang/tahun.
3. Termiskin, bisa dikatakan orang yang berpenghasilan jika di wujudkan bentuk beras adalah 190 kg/orang/tahun(Suharto, 2008: 11).

Kemiskinan memiliki beberapa ciri, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak mampu terpenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan)
2. Tidak ada akses pada kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, rumah, air bersih dan transportasi).
3. Tidak ada jaminan masa selanjutnya (karena tidak ada dana untuk pendidikan dan keluarga)
4. Kurangnya terhadap goncengan yang bersifat individual maupun massal.
5. Sedikitnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam.
6. Tidak termasuk dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak ada akses pada lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkelanjutan.
8. Kurang mampu untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

9. Tidak mampu dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindakan kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal, dan terpencil) (Suharto, 2008: 14).

Menurut David (2010: 14), kemiskinan bisa dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan yang mengakibatkan pada globalisasi, globalisasi dihasilakan pemenang dan yang kalah. Pemenang suatu Negara yang maju dan Negara yang sedang berkembang untuk persaingan pasar bebas yang merupakan pasar globalisasi.
2. Kemiskin dikaitan pada pembangunan, kemiskinan substansi (kemiskinan mengakibatkan peminggiran perdesaan pada proses-proses pembangunan) kemiskinan kota (kemiskinan diakibat hakekat dan lajunya pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial, kemiskinan yang diperoleh oleh perempuan, anak dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial, kemiskinan terjadi pada akibat kejadian-kejadaian lain atau faktor-faktor eksternal.

Adapun yang menjadi karakteristik penduduk miskin yaitu sebagai berikut:

1. Penduduk miskin pada lainnya tidak memiliki faktor produksi sendiri.
2. Tidak mempunyai besar untuk memperoleh asset produksi pada kekuatan itu sendiri.
3. Tingkat pendidikannya masi rendah/kurang.
4. Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas.

5. Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai bakat atau pendidikan yang memadai.
6. Makan dua atau sehari sekali tetapi jarang makan telur atau makan ayam (makanan yang bergizi).
7. Tidak ada biaya berobat karena sakit.
8. Memiliki banyak anak atau satu rumah dihuni banyak keluarga atau dipimpin kepala keluarga perempuan (Wibawa, 2009: 25).

Adapun yang menjadi penyebab kemiskinan yaitu sebagai berikut :

1. Kemiskinan karena kolonialisme, kemiskinan itu terjadi pada penjajahan yang dilakukan oleh suatu negara lain, sehingga negara yang dijajah menjadi tertindas, baik di bidang ekonomi, politik dan sebagainya.
2. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural, karena ini terkait dengan suku bangsa tertentu yang kental kebudayaannya, seperti suku kubu Sumatera, suku Dayak di pedalaman Kalimantan.
3. Miskin karena terisolir, orang menjadi miskin karena tempat tinggalnya jauh dari kota sehingga sulit berkembang.
4. Miskin struktural, merupakan kemiskinan yang dikenai karena kondisi struktural atau tatanan kehidupan yang menguntungkan. Kemiskinan ini disebabkan juga oleh persaingan yang tidak seimbang antar Negara atau daerah yang mempunyai keunggulan komparatif (Wibawa, 2009: 29).

## **2.6 Konsep Bantuan Langsung Tunai**

### **1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai**

Pengertian BLT ini merupakan program kompensasi jangka pendek yang di keluarkan oleh pemerintah dan serta tujuan yang utamanya merupakan dalam membantu masyarakat yang termasuk miskin, lebih tepatnya membantu rumah tangga yang termasuk miskin, karena dampak Covid-19 yang sangat berbahaya (Wibawa, 2009: 76).

BLT merupakan program kompensasi jangka pendek yang dimaksud, dalam tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran. Dan rumah tangga termasuk sangat miskin, miskin dan dekat dengan miskin (*near poor*), tidak kemungkinan pada saat terjadinya dampak Covid-19 dapat terjadi kemiskinan dalam negeri. Dengan ini walaupun program BLT bukan suatu program yang berkenan dalam pemecahan masalah kemiskinan, diharapkan bisa mendorong untuk penanggulangan pada kemiskinan, pada saat terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup masyarakat menuju keseimbangan yang baru (Tangkilisan, 2010: 65).

BLT adalah berupa uang tunai yang diberi pada rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin, BLT dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran dalam kurun waktu pertiga bulan sebesar Rp. 600.000, dan bulan selanjutnya Rp.300.000, Adapun tujuan dari BLT adalah untuk membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, serta mencegah penurunan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat miskin mengakibatkan sulitnya ekonomi dan juga tingkat tanggung jawab sosial bersama. Pemerintah berharap untuk masyarakat penerima BLT merupakan bisa dan mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kebijakan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak ini juga dilanjutkan dengan kebijakan lain, seperti pemberdayaan melalui program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri, sehingga skema perlindungan sosial bagi masyarakat miskin tetap mendorong keberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki pemerintah melaksanakan skema Program Kompensasi Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) meliputi:

- a. Dalam bidang pendidikan, bisa menyukseskan program wajib belajar 9 tahun melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (KBM)
- b. Dalam bidang kesehatan, diarahkan bisa tingkatan pelayanan kesehatan melalui sistem jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, yang meliputi layanan kesehatan dasar, layanan kesehatan rujukan dan pelayanan penunjang lainnya. Bidang infrastruktur di desa tertinggal (jalan, jembatan, air bersih, jamban, perahu, irigasi desa sederhana dan penyediaan listrik bagi daerah yang betul-betul memerlukan) (Widianto, 2008: 78)

## **2. Organisasi Pelaksanaan Penyaluran Dana BLT**

Pelaksanaan program BLT merupakan Departemen Sosial selaku kuasa penggunaan Anggaran membantu oleh pihak-pihak terikat pada yang telah ditentukan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 dalam pelaksanaan program. Bantuan Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran. Penyaluran BLT pada Rumah Tangga Sasaran adalah suatu bentuk kinerja

sama yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing, pada lembaga bertanggung jawab kepada kelancaran bidang tugas masing-masing. Dalam kerja sama ini dimaksudkan dalam lajunya proses penyaluran dana BLT Kepada Rumah Tangga Sasaran kelompok sasaran sehingga pemakaian menjadi lebih maksimal.

Pada tingkat sinergi pelayanan yang optimal dan masing-masing lembaga saling berinformasi dan dalam program BLT difasilitasi penyediaan Unit Pelaksanaan Program BLT. Tugas pokok dan tanggung jawab dari setiap lembaga bisa dilihat dari Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang pelaksanaan program BLT pada Rumah Tangga Sasaran yang bisa dilihat sebagai berikut:

a. Departemen Sosial

Departemen sosial ini membutuhkan kewajiban dalam menyiapkan modal berdasarkan daftar nominal dan menyampaikan Surat perintah kepada Pos Indonesia untuk dibayar dana BLT pada Rumah Tangga Sasaran kemudian itu kerja sama dengan PT Pos Indonesia (persero) Tbk bisa menyalurkan modal tersebut sesuai dengan daftar nominatif penerima BLT yang disampaikan oleh pusat Biro Statistik (BPS). Pada kejelasan dimana proses penyalurannya, Departemen sosial berkewajiban bisa dibuat dan menyusun cara teknis penyaluran BLT bersama 40 Bappenas, Menko Kesra, Depdagri, BPS, PT. Pos Indonesia (persero) dan PT. BRI (persero)Tbk. Dimana tanggung jawab pada pemerintah, Departemen sosial wajib di buat laporan pelaksanaan kepada Presiden RI dalam pelaksanaan jalannya dana BLT Kepada presiden RI.

b. Kewajiban PT Pos Indonesia (persero)

Adapun kewajiban dari PT Pos Indonesia dalam program BLT ini rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak adalah menyimpan rekening Giro utama di Bank Cabang Indonesia Veteran. Berdasarkan anggaran dari Departemen sosial yang bisa disalurkan pada rekening Giro. Kantor Pos dicetak dan menyalurkan Kartu Kompesasi BBM (KKB) ke KRPK (Kantor Pos Pemerintah) seluruh Indonesia berdasarkan daftar nominatif, kemudian KRPK Menyalurkan KKB kepada Rumah Tangga Sasaran kerja sama dengan aparat desa setempat, TKSM (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat ) dan aparat keamanan dan aparat keamanan perlu dibutukan. Dalam hal ini PT. Pos Indonesia juga bisa laporkan realisasi pjalannya KKB Kepada Departmen Sosial dan kemudian menyampaikan rancangan penyaluran dana BLT.

c. Kewajiaban Bank Rakyat Indonesia

Bank Rakyat Indonesia memiliki peran penting dalam menyiapkan modal BLT. PT Pos Indonesia dan BRI bisa dibebaskan dana administrasi pembukaan rekening dan dibedakan atas kewajiban setoran awal untuk pembukuan giro di Kantor Camat BRI Jakarta Veteran dan Kantor Cabang BRI seluruh Indonesia. Demi jalannya untuk proses penyaluran dan administrasi BLT, BRI diberikan kemudahan kepada PT Pos Indonesia untuk memindahbukukan dana dari rekening Giro Kantor Pos seluruh Indonesia. Salah satu bentuk kewajiban dan tanggung jawab, BRI bisa disampaikan hasil keuangan mutasi rekening Giro utama dari Giro Kantor Pos melalui layanan tunai manajemen BRI.

d. Kewajiban Badan Pusat Statistik

Lembaga ini merupakan peran dan wajib dalam menyediakan data rumah tangga sasaran penerima BLT yang dikategorikan rumah tangga sangat miskin, dan rumah tangga miskin. Untuk itu disediakan data tersebut melakukan data terakhir (*up dating*) di lapangan, BPS bisa memiliki kewajiban dalam membuat laporan pelaksanaan program BLT sesuai dengan tugas dan kewenangan yang akan dimiliki.

e. Kewajiban Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi

Pada tataran dinas/Instansi sosial Provinsi dalam proses program BLT tersebut, wajib mengontrol unit pelaksanaan BLT pada tingkat Provinsi dan struktur pelaksanaannya, ketua pengolah Unit Pelaksana Program (UPP) BLT merupakan kepala dinas sosial, untuk bertugas dalam intensif selama pelaksanaan program BLT. Dilakukan pembinaan, supervisor dan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT termasuk unit pelaksanaan program BLT ditingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Juga bisa mengkoordinasikan dinas/instansi sosial kabupaten/kota untuk pelaksanaan disamping terhadap kantor pos pada saat pembagian BLT dengan di libatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.

f. Kewajiban Dinas/Instansi Kabupaten Kota

Pada tingkat jajaran dinas atau lembaga sosial Kabupaten/Kota, pada proses penyaluran BLT dimiliki peran dan kewajiban dalam membuat unit pelaksanaan program BLT dan paruh jabatan yang di duduki struktur organisasi membuat penyaluran BLT, sebagai ketua UUP BLT merupakan kepala dinas/instansi sosial, sekretaris dan anggota di tetapkan pejabat di

halaman dinas sosial yang menjaga baik intensif selama proses pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai.

g. Kewajiban Kecamatan (Camat)

Mengola UUP BLT pada tingkat kecamatan. Di pantau mitra kerja pada tingkat kecamatan/desa/kelurahan yang bisa terlibat secara optimal untuk pendistribusian kartu BLT dan penyaluran dana BLT sehingga mengendalikan dan keamanan di lapangan. Menyelenggarakan pelaksanaan pertemuan koordinasi dengan seluruh mitra pada tingkat kecamatan. Di informasikan program BLT kepada RTS dan di dukung sosialisasi pada masyarakat umum. Dipantau petugas pos pada saat distribusi kartu BLT bisa sampai pada sasaran yaitu RTS. Melaksanakan pendampingan dan dibantu petugas pos pada saat pembagian kartu BLT dan pembayaran BLT yang melibatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat. Dipantau hingga menyelesaikan masalah oleh desa/kelurahan sesuai dan jenis pengaduan dan tingkat kewenangan melalui instansi terkait, masuk pada dinas pada tingkat kecamatan. Di buat hasil pelaksanaan program BLT secara benar dan kewenangan yang dimiliki secara berjenjang pada pihak yang terkait, masuk pada dinas sosial kabupaten/kota.

h. Kewajiban Desa/Kelurahan

Di pantau petugas pos pada cairnya atau penerima BLT dan pendistribusian kartu kepada Rumah Tangga Sasaran. Bersama-sama dengan petugas pos ditentukan yang mengganti RTS yang pindah/meninggal (tanpa ahli waris) atau yang berhak, melalui

musyawarah desa/kelurahan yang dihadiri kepala desa/kelurahan, Rt/Rw tempat tinggal RTS yang diganti, tokoh agama, tokoh masyarakat dan Karang Taruna. Di lakukan pendampingan untuk petugas pos pada saat membagikan kartu BLT dan penyebaran yang di libatkan tenaga kerja kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam upaya menyelesaikan yang terjadi (antara lain pada saat penetapan RTS, distribusi kartu dan penyaluran BLT) sesuai dengan jenis dan tingkat kewenangan (Widianto, 2008: 78).

## **2.7 Kerangka Berfikir**

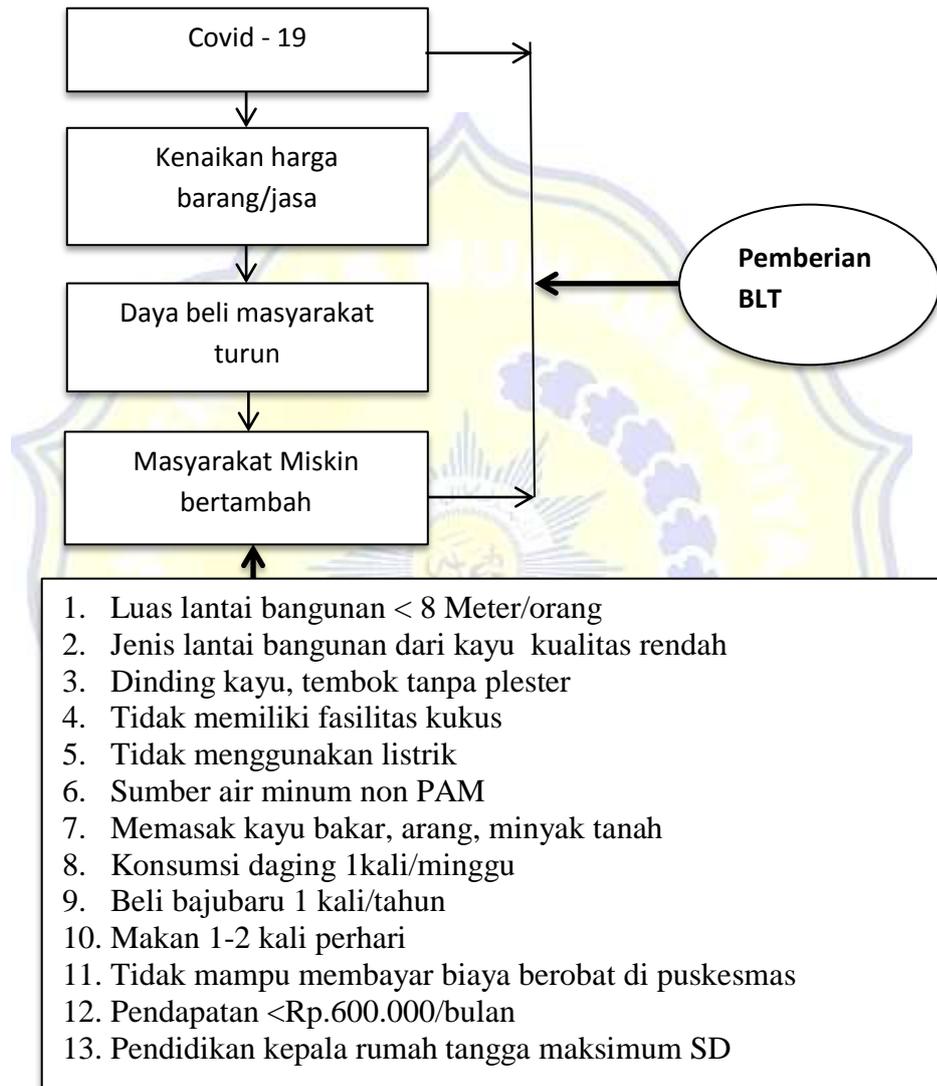
Indonesia mengalami dampak yang sangat berbahaya untuk saat ini yaitu Covid-19 diakibatkan kenaikan harga dari berbagai barang dan jasa, termasuk berbagai kebutuhan pokok hidupnya. Akibat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat, dan sekaligus diakibatkan penurunan kemampuan masyarakat dalam memenuhi hidupnya. Kondisi ini diakibatkan tingginya jumlah masyarakat miskin. Yaitu implementasi sosial yang di tetapkan dan di berlakukan pemerintah merupakan pemberian BLT.

Dalam rangka implementasi sosial ini, pemerintah sudah di tetapkan mekanisme pelaksanaan, masuk di dalamnya syarat-syarat bagi penerima. Dalam berbagi berita sering di informasikan tentang polemik di berbagai pihak pemberian BLT. Demikian juga, tidak jarang diberikan tentang protes masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil atas implementasi itu.

Sementara polemik atas implementasi ini di antaranya berkenaan dengan efektivitas program pemberian BLT. Untuk meningkat sosial ekonomi dan pemecahan masalah kemiskinan. Berapa pihak yang mengeluarkan ide

bahwa pemberian BLT. Memberi pengaruh yang signifikan terhadap sosial ekonomi dan ada pendapat sebaliknya. Selanjutnya kerangka pemikiran dalam penelitian ini sketsakan dalam bentuk bagian pola pikir berikut ini.

**Bagan 1**  
**Bagan Kerangka Berpikir**



**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

**3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian (*research methods*) yaitu cara yang akan digunakan oleh peneliti untuk merancang, dilaksanakan, membuat data, dan di tarik kesimpulan berkenan untuk masalah penelitian tersebut.

Jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*) merupakan yaitu metode penelitian untuk ditunjukkan dalam menggambarkan fenomena yang ada, langsung pada waktu ini atau waktu yang lampau. Menurut (Furchan A,2004 ) penelitian deskriptif mempunyai karakter.

1. Penelitian deskriptif lebih menggambarkan sebuah fenomena yang ada untuk cara menelaah secara terurut-ketat, mengutamakan obyektivitas, yang dilakukan secara benar.
2. Tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan, dan tidak adanya uji h.

Berdasarkan ahli di atas, jenis-jenis penelitian menggunakan yaitu jenis deskriptif tentang Implementasi program Bantuan Langsung Tunai di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano.

### **3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu**

Penelitian ini di laksanakan di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano. Alasan pemilihan lokasi peneliitian, dikarenakan penelitian tantang program BLT belum pernah diteliti sebelumnya. Selain itu, pemilihan Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano lokasi penelitian, karena lokasi tersebut memudahkan peneliti dalam memperoleh data.

### **3.3 Pemilihan Informan/Nara sumber**

Informan/Narasumber merupakan seseorang akan di jadikan sebagai subjek penelitian (Sugiyono, 2010: 299). Untuk penelitian kualitatif tidak digunakan

populasi, soalnya penelitian kualitatif terangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak bisa dilakukan ke populasi, tapi bisa ditransferkan ke yang lain untuk situasi sosial yang di miliki persamaan untuk situasi sosial yang di miliki kesamaan dengan situasi sosial untuk kasus sudah dipelajari. Sampel untuk penelitian kualitatif tidak dinamakan responden, karena sebagai narasumber, atau partisipasi, informan, kawan dan guru untuk penelitian. Sampel untuk penelitian kualitatif, bukan disebut sampel statistik, itu sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif merupakan dapat dihasilkan teori. Sampel untuk penelitian kualitatif bisa disebut sebagai sampel konstruktif, karena ada sumber data dari sampel itu dapat dikonstruksikan fenomena yang awal masih belum jelas (Sugiyono, 2010: 299).

Di dalam penelitian kualitatif, teknik sampling juga menggunakan yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling purposive sampling*, yaitu teknik untuk mengambil sampel di dasarkan pada ciri, sifat atau karakteristik sebelumnya akan dipaparkan ciri-ciri populasi dan subjek akan di ambil berbagai subjek penelitian. *snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data, yang ada pertamanya jumlah sedikit, kemudian menjadi banyak. Hal ini dikemukakan semua dari beberapa sumber data yang kecil itu tersebut belum bisa diberikan data yang cukup. Maka dicari orang lain lagi yang bisa menggunakan pada sumber data. Setelah beberapa sampel sumber data akan makin banyak, bagai bola salju yang mengelinding semakin akan menjadi besar (Sugiyono, 2010: 85-86).

Berdasarkan hal yang di atas kita menyimpulkan bahwa ketentuan teknik sampel untuk penelitian di gunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Subyek untuk penelitian ini merupakan masyarakat umum,

masyarakat yang menerima BLT , kepala desa beserta staf Desa Tua Nanga, staf Kantor Camat Poto Tano.

### **3.3 Metode Pengumpulan data**

Metode untuk mengumpulkan data yaitu cara menggunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, pada hal ini merupakan proses yang memperolehnya data dari sumber data, sumber data yang dimaksud berasal dari subjek penelitian (Mardalis, 2004: 87). Untuk penelitian tersebut, data yang dikumpulkan digunakan metode sebagai berikut:

#### **1. Metode Observasi**

Observasi merupakan yang kita amati pada tingkah laku untuk suatu situasi tertentu (Mardalis, 2004: 20). Orang lain dikemukakan bahwa Observasi merupakan alat membantu untuk dikumpulkan data serupa tingkah laku tertentu (Sugiyono, 2010: 19). Kemudian menurut Arikunto (2008: 20), macam-macam observasi di liputi observasi partisipatif, suatu apabila pengobservasi ikut terlibat akan kegiatan subjek yang sedang diobservasi, selanjutnya tentang implementasi program Bantuan Langsung Tunai di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano.

#### **2. Metode Wawancara**

Metode wawancara merupakan suatu dialog yang dilakukan para pewawancara (Arikunto, 2008: 126). Pendangan lain mengatakan suatu metode wawancara merupakan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab antara penanya atau pewawancara untuk responden/penjawab (Mardalis, 2004: 109).

Dari pandangan ahli diatas, bisa kita menyimpulkan yaitu metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan Tanya jawab secara langsung, akan dilakukan para pewawancara dengan responden bisa di peroleh informasi yang dibutuhkan.

Mardalis (2004: 109), macam wawancara yang berbeda jadi wawancara-wawancara terstruktur dan untuk wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara akan melaksanakan sesuai terencana dengan berpedoman untuk daftar pernyataan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan.

Dari pandangan ini, harus bisa disimpulkan pada metode wawancara yang di gunakan untuk penelitian ini merupakan metode wawancara terstruktur yang di gunakan untuk mengumpulkan data Implementasi program Bantuan Langsung Tunai di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano.

3. Metode Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai sesuatu atau variable yang serupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen raport, lager agenda dan sebagiannya (Arikunto, 2008: 17). pendapat lain mengemukakan yaitu metode dokumentasi merupakan dengan cara pengumpulan data dengan cara dikumpulkan dalam jenis dokumentasi, serta menjadikan pencatatan sistematis (Mardalis, 2004: 187). Metode dokumentasi sesuatu penelitian ini yaitu data tentang profil Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano.

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

### 3.5.1 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2010: 14), macam data bisa di bagi menjadi dua sebagai berikut:

1. Data kualitatif merupakan aturan atau cara memecahkan masalah penelitian sangat mempergunakan keadaan obyek akan ditelusuri selanjtnya disimpulkan dengan kalimat bagi prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan mempergunakan keadaan obyek yang ditelusuri sebaiknya yang berdasarkan jenis-jenis yang aktual pada saat ini.
2. Data kualitatif suatu pemecahan masalah yang menjabarkannya dengan menggunakan angka statistik.

Adapun cara macam data akan digunakan untuk penelitian ini merupakan data kualitatif. Data ini berbentuk kalimat, kata atau gambar atau data yang tidak dapat di ukur nilainya secara langsung yang dinyatakan dalam bentuk tanggapan atau pertanyaan. selanjutnya data yang menggunakan untuk penelitian seluasnya yaitu data kualitatif pada kalimat (Sugiyono, 2010: 14).

Berdasarkan pemikiran di atas, yaitu data kualitatif merupakan macam data yang berbentuk kata-kata, kalimat atau pandangan dari responden.

### 3.5.2 Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini merupakan sumber untuk di peroleh suatu subyek selama dilakukan penelitian. Menurut Surakhmad

(2009: 134), sumber data untuk karakter dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Dari data primer merupakan sumber-sumber yang diberikan data secara langsung dari tangan pertama.
2. Dari data sekunder merupakan sumber mengutip dari buku-buku, hasil-hasil penelitian yang wujud laporan (Arikunto, 2008: 67).

Data primer ini menggunakan untuk penelitian ini merupakan data yang memperoleh dari hasil wawancara dan observasi dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano. Data sekunder juga menggunakan untuk penelitian ini yaitu data yang memperoleh dari hasil penelitian.

### **3.6 Metode Analisis Data**

Penelitian ini para peneliti di gunakan analisis model interaktif. Analisis interaktif terbagi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, klarifikasi (Arikunto, 2008: 89).

1. Reduksi data

Reduksi data ini merupakan suatu pilihan, pemusatan data menyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data baku yang keluar dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Arikunto, 2008: 91). Data untuk direduksi dalam penelitian ini merupakan data tentang

implementasi program Bantuan Langsung Tunai di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano.

## 2. Penyajian Data

Alur penting kedua ini dari kegiatan analisis data merupakan penyajian data berbagai kesimpulan informan terurut untuk diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Arikunto, 2008: 93). Data ini di berikan untuk penelitian ini dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano.

## 3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu berbagai suatu bagian konfigurasi yang baik, kesimpulan-kesimpulan ini di verifikasi untuk penelitian sedang berjalan (Arikunto, 2008: 95). Analisis data yaitu penelitian untuk melakukan ssebelum data berkumpul dan diseleksi. Mengolah data untuk melakukan cara menarik simpulan secara induktif.

### **3.7 Uji Validitas Data**

Pemeriksaan keabsahan pada penelitian kualitatif untuk di katakan tidak ilmiah, ini merupakan berbagai macam yang tidak berpisah dari badan pengetahuan penelitian (Moleong, 2007:320).

Untuk data penelitian kualitatif ini bisa dipertanggungjawaban berbagai penelitian ilmiah harus dilakukan keabsahan data. Kemudian juga uji keabsahan data akan dijalankan.

#### 1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji percaya kepada data hasil penelitian akan di berikan pada peneliti agar hasil penelitian dalam melakukan tidak ragu berbagai suatu karya ilmiah di laksanakan.

- a. Panjang amatan bisa ditingkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dalam perpanjangan amatan berarti peneliti akan kelapangan, di lakukan amatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemukan adapun sumber data yang lebih baru. Panjang amatan terhubung antar peneliti dengan sumber bisa semakin terjalin, makin akrab, makin terbuka, saling timbul percaya, kemudian informasi dapat memperoleh sangat banyak dan lengkap.

Panjang amatan akan di uji kredibilitas data penelitian memfokuskan pada pengujian data yang sudah memperoleh. Data akan diperoleh sesudah dicek lagi ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Kemudian dicek lagi ke lapangan data yang sudah memperoleh bisa untuk dipertanggungjawaban/benar artian kredibel, akan perpanjangan pengamatan harus berakhir.

- b. Meningkatkan cermatan untuk penelitian

Ditingkatkan cermatan atau tekun cara berkelanjutan harus ada kepastian data dan terurutnya kronologis kejadian bisa mencatat atau dividio dengan baik, teratur. Meningkatkan kecermatan adalah cara kontrol/dicek kerja apa data sudah terkumpulkan, membuat dan diberikan udah bagus atau tidak.

Dalam ditingkatkan tekun peneliti bisa melakukan dengan cara dibaca sebagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan

dokumen-dokumen terikat dengan dibandingkan hasil penelitian yang sudah memperoleh. Kemudian cara demikian, peneliti harus akan semakin cermat untuk dibuat laporan yang akan akhirnya laporan yang dibuat bisa sangat berkualitas.

### c. Triangulasi

William wiersma (1986) dikatakan triangulasi untuk pengujian kredibilitas berarti berbagai mengecek data dari berbagai sumber, triangulasi cara pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:274).

#### 1. Triangulasi Sumber

Dalam menguji kredibilitas data ini melakukan dengan cara pengecekan data memperoleh melalui beberapa sumber. Data akan memperoleh dianalisis untuk peneliti hingga menghasilkan yaitu kesimpulan kemudian dimintakan kesepakatan (*member chek*) dalam tiga sumber data (Sugiyono,2007:274).

#### 2. Triangulasi Teknik

Dalam menguji kredibilitas data ini melakukan dengan cara pengecekan data pada sumber yang sama dengan teknik akan berbeda. Misal dalam dicek data dapat melalui wawancara, obsevasi, dokumentasi. Bisa dengan teknik pengujian kredibilitas data ini dihasilkan data yang beda, dan peneliti dilakukan berdiskusi akan berlanjut pada sumber data yang berkaitan data apa yang dianggap benar (Sugiyono,2007:274).

#### 3. Triangulasi Waktu

Data yang terkumpul cara teknik wawancara dipagi hari dan saat narasumber masih cerah, bisa diberikan data lebih efektif hingga bisa kredibel. Kemudian bisa melakukan cara mengecek dengan wawancara, observasi atau teknik lain untuk jam situasi berbeda. kemudian hasil uji dihasilkan data yang berbeda, maka harus melakukan cara berulang-ulang hingga bisa ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007:274).

d. Analisis Kasus Negatif

Di lakukan analisis kasus negative artii peneliti dicari data yang lain atau melainkan bertentang dengan data yang sudah ditemui. Selanjutnya tidak ada harus data yang beda atau bertentangan dengan temuan, arti masih didapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemui, dan peneliti kemungkinan bisa diubah temuannya (Sugiyono, 2007:275).

e. Menggunakan Bahan Referensi

Ini dimaksudkan referensi merupakan pendukung dalam dibuktikan data yang sudah ditemui para peneliti. Untuk laporan penelitian, sebaliknya data-data yang dikemukakan harus melengkapi foto-foto atau dokumen, hingga jadi bisa dipercaya (Sugiyono, 2007:275).

f. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan *membercheck* merupakan untuk diketahui beberapa lama data bisa memperoleh sesuai dengan yang suda diberikan para pemberi data. Untuk tujuan membercheck yaitur bisa informasi akan

memperoleh dan bisa menggunakan untuk penulisan laporan pasti dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007:276)

## 2. *Transferability*

*Transferability* adalah validitas eksternal untuk penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat tepatnya atau bisa diterapkan hasil penelitian ke populasi di situ sampel ini diambil (Sugiyono, 2007:276).

Pertanyaan ini terkait dengan nilai transfer sudah sekarang masih bisa diterapkan/dipakai untuk situasi lain. Sebagai peneliti nilai transfer lebih tergantung pada ke pemakai, hingga nanti penelitian bisa menggunakan untuk konteks yang lain di situasi sosial yang lain validitas nilai transfer sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

## 3. *Defendability*

Reliabilitas atau penelitian ini bisa dipercayai, untuk kata lain seberapa robaan akan melakukan lebih dipatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas merupakan penelitian bila penelitian hanya melakukan pada orang berbeda untuk proses penelitian yang sama bisa diperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* melakukan secara di lakukan audit terhadap semua proses penelitian. Yaitu cara audit yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit semua aktivitas akan melakukan para peneliti untuk dilakukan penelitian. Misa dapat memulai ketika sebagaimana peneliti dalam ditentukan masalah, turun ke lapangan, milih

sumber data, dilaksanakan analisis data, di lakukan pengujian keabsahan data, hingga dalam di buatnya laporan hasil amatan.

#### 4. *Confirmability*

Objektivitas uji kualitatif juga bisa dalam uji *confirmability* penelitian. Penelitian dapat mengatakan objektif bila hasil penelitian sudah disepakati para semua orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* arti menguji hasil penelitian yang terkait dengan proses yang sudah dilakukan. Bila hasil penelitian Yaitu fungsi dari proses penelitian melakukan, dan penelitian ini suda terpenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data merupakan yang tidak berbeda antar data sudah memperoleh para peneliti dalam data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian hingga keabsahan data yang sudah diberikan bisa dipertanggungjawabkan.